



## Penjenamaan Diambil dari Dana RSUD DKI

### ■ ZAINUR MAHSIR RAMADHAN

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI menyebutkan, anggaran untuk penjenamaan atau penciptaan merek tentang rumah sehat menggunakan dana dari 31 RSUD. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan, anggaran tersebut tidak dikeluarkan dari APBD sehingga besaran dana untuk *branding* bergantung pada masing-masing RSUD.

"Itu *kan* cuma logo, *nggak* seberapa anggarannya. Bisa diatasi dengan dana RSUD," kata Riza kepada awak media di Balai Kota DKI, Selasa (9/8).

Dia menambahkan, setiap RSUD sudah memiliki pembiayaan masing-masing dan bisa diatasi secara mandiri. Hal terpenting, kata dia, adalah mengenai konsep dan desain penjenamaan rumah sehat yang telah disiapkan.

Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, proses penggantian logo rumah sehat untuk seluruh RSUD di DKI Jakarta akan dilakukan secara bertahap. Menurut dia, pendanaan nantinya berasal dari anggaran masing-masing RSUD, bukan dari APBD DKI Jakarta.

"Secara bertahap sesuai anggaran masing-masing RSUD," kata Ani.

Menurut dia, pendanaan itu nantinya akan masuk kepada kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana (*sarpras*) di setiap rumah sehat. Perinciannya, kata dia, setiap rumah sakit atau yang kini disebut rumah sehat tersebut akan mulai melakukan penggantian sesuai kondisi keuangan rumah sakit.

"Setiap RSUD melaksanakan, tetapi secara bertahap menyesuaikan dengan anggaran dan sebagai bagian dari pemeliharaan gedung," ujarnya.

Ditanya *rebranding* gedung yang ditanggung setiap rumah sehat nantinya, Ani menegaskan, dana bukan berasal dari APBD DKI Jakarta, melainkan dari pendanaan dan kemampuan masing-masing

RSUD untuk sarana dan prasarana.

Ani sebelumnya menyebut, penjenamaan rumah sehat tidak akan mengubah nama dalam nomenklatur unit kerja perangkat daerah (UKPD). "Terkait penjenamaan rumah sehat untuk Jakarta sudah cukup lama disiapkan," kata Ani.

Ditanya pertimbangan penjenamaan itu, dia menerangkan jika Provinsi DKI Jakarta melihat beberapa poin dalam pelaksanaannya. Pertama, kata dia, mengubah pola pikir masyarakat, terutama saat yang datang ke rumah sakit tidak hanya bisa dilakukan saat sakit.

"Namun, juga untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kesehatannya," ujarnya.

Ani menuturkan, pertimbangan kedua penjenamaan dilakukan untuk mengembangkan konsep layanan promotif preventif sebagai bagian dari layanan rumah sakit yang berkesinambungan. Ketiga, kata dia, penjenamaan juga mencakup pada perubahan logo yang bertujuan sebagai kesatuan identitas bagi fasilitas kesehatan milik DKI Jakarta.

"Sehingga, jejaring layanan dapat lebih baik dan mampu memberikan akses luas kepada masyarakat," katanya.

Terakhir, kata dia, penjenamaan juga dimanfaatkan sebagai momentum semua unsur dalam rumah sehat Jakarta memberikan layanan kesehatan. Layanan itu khususnya yang berorientasi pada pasien dan mengembangkan keramahan (*hospitality*) dalam pelayanan hingga memberikan pengalaman baik bagi masyarakat.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengubah nama RSUD di lima wilayah Jakarta menjadi rumah sehat. Penjenamaan ini, kata Anies, dilakukan untuk menyeragamkan simbol rumah sakit seluruh Jakarta, mengingat selama ini kerap berbeda dan jauh dari kesatuan. Padahal, Anies menilai, semua RSUD itu sebagai institusi masyarakat yang memberi pelayanan kepada masyarakat dan seluruh warga. ■ **ed:** nur aini